

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA SOLOK
(Studi pada SKPD Kota Solok)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang*



IRINE CHINTYA
NIM: 56336/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA SOLOK

NAMA : IRINE CHINTYA
BP/NIM : 2010/56336
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI
UNIVERSITAS : NEGERI PADANG

Padang, Februari 2015

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Herlina Helmy, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Pembimbing II



Mayar Afriventi, SE, M.Sc
NIP. 19840113 200912 2 005

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199003 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

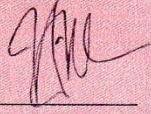
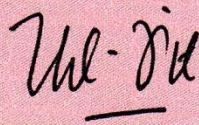
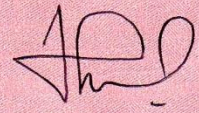
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA SOLOK

Nama : Irine Chintya
TM/NIM : 2010/56336
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Herlina Helmy, SE, M.Sc, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	2. 
3. Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Irine Chintya
BP/NIM	: 2010/56336
Tempat/Tanggal Lahir	: Selayo/8 Juli 1990
Program Studi	: Akuntansi
Keahlian	: Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jl. Cendrawasih gang Merpati No 10 Air Tawar Barat Padang
No. Hp/Telepone	: 081947494961
Judul Skripsi	: Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2015
Yang membuat pernyataan.



Irine Chintya
rine Chintya
NIM : 56336

ABSTRAK

Irine Chintya, 2010/56336. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok.

Pembimbing : 1. Herlina Helmy, SE, M.Sc, Ak

2. Mayar Afriyenti, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Solok. Penelitian ini dilakukan pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Pengujian data yang digunakan untuk regresi linear berganda adalah uji kualitas data dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar 3,676 dengan signifikansi 0,001 (α 0,05). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan koefisien regresi 1,792 dan signifikansi 0,049 (α 0,05). Sedangkan nilai R square yaitu sebesar 0,437 yang berarti sebesar 43,7% variabel independen dalam penelitian ini mampu mempengaruhi variabel dependen.

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Dalam hal waktu, hendaklah peneliti selanjutnya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. 2) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen yang memungkinkan dalam mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Misalnya variabel kompetensi SDM yang ada, budaya organisasi, komitmen pegawai, ketaatan terhadap peraturan perundangan, penerapan akuntabilitas keuangan dan lain sebagainya. 3) Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode lapangan dan wawancara. 4) Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa item pernyataan ke 6 pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_2) pada tabel distribusi frekuensi memperoleh nilai TCR terendah setelah yaitu 77,78%. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan batas dan penetapan toleransi resiko pada SKPD Kota Solok belum begitu baik. Penulis menyarankan agar penentuan batas dan penetapan toleransi resiko pada SKPD bisa lebih dijalankan sesuai dengan yang telah ditentukan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Herlina Helmy, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Kepada dosen Penasehat Akademik (PA) Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu

penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.

5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa kepada orang tua yang selalu mendo'akan, Ayahanda Syamsir dan Ibunda tercinta Yusminar. Serta keluarga besar saya yang senantiasa sabar dalam memberikan motivasi dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan S1 saya.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Akuntansi TM 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Berkat dukungan moril dari mereka saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 saya dengan baik.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
1. Kinerja Instansi Pemerintah	12
a. Pengertian Kinerja	12
b. Indikator Kinerja	13
c. Tujuan Pengukuran Kinerja	16
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi	17
a. Pengertian Teknologi Informasi	17

b. Tingkat Integrasi Teknologi Informasi	20
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	21
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern	21
b. Tujuan SPIP	22
c. Unsur-unsur SPIP	23
B. Penelitian Yang Relevan	27
C. Hubungan Antar Variabel	29
D. Kerangka Konseptual	32
E. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Populasi Dan Sampel	34
1. Populasi	34
2. Sampel	35
C. Jenis Dan Sumber Data	36
1. Jenis Data	36
2. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Variabel Penelitian	37
F. Instrumen Penelitian	37
G. Pengukuran Variabel	39
H. Defenisi Operasional	39
I. Uji Instrumen.....	40

1. Uji Validitas Instrumen.....	40
2. Uji Reliabilitas Instrumen	40
J. Uji Asumsi Klasik	42
K. Teknik Analisis Data	43
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Sampel dan Responden Penelitian	47
B. Analisis Deskriptif.....	47
1. Karakteristik Respoden	47
2. Statistik Deskriptif	50
3. Deskripsi Varabel Penelitian	51
C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	56
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	58
E. Uji Model	61
F. Uji Hipotesis	65
G. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Keterbatasan	72
C. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	27
2. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Solok	35
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	38
4. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat	39
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	47
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	48
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
8. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja	49
9. Statistik Deskriptif	50
10. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	52
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel SPIP	53
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kinerja Instansi Pemerintah	55
13. Nilai Corrected Item Total Correlation Terkecil	57
14. Nilai Cronbach Alpha	57
15. Uji Normalitas Residual	59
16. Uji Multikolinearitas	60
17. Uji Heteroskedastisitas	61
18. Uji F Hitung.....	62
19. Koefisien Determinasi (R^2)	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian
interen pemerintah 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Distribusi Frekuensi Skor Variabel
3. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Penelitian
4. Hasil Pengolahan Data SPSS 16
5. Surat Izin Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab yang diperbaharui dengan UU No 32 tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang tersebut melahirkan paradigma baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralistik birokratik ke pemerintah yang desentralistik partisipatoris. Adanya reformasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap manajemen keuangan daerah. Setidaknya perubahan ini dibutuhkan karena ada dua alasan, yaitu : 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi, maupun pertanggungjawaban.

Perubahan aspek informasi yang paling dominan adalah pada aspek pemerintahan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan

kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode. Selain itu, tuntutan atas perubahan organisasi publik baik secara individu ataupun anggota kelompok sangat diharapkan, perubahan ini sering ditujukan kepada aparatur pemerintah menyangkut prestasi kerja yang diberikan kepada organisasi.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparatur pemerintah. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan mengintegrasikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. Kinerja aparatur pemerintah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah, oleh karena itu kinerja pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam sektor publik, khususnya sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Untuk menilai kinerja pemerintah diperlukan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator-indikator masukan, keluaran, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengelola masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja sektor publik ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Fenomena yang terjadi di Kota Solok adalah terjadinya penurunan opini untuk laporan keuangan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2012 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2013. Hal tersebut menunjukkan kinerja pemerintah Kota Solok kembali menurun dari tahun sebelumnya, karena kinerja suatu pemerintah dapat dilihat dari laporan keuangannya. Untuk pertama kalinya Kota Solok berhasil memperoleh opini WTP untuk laporan keuangannya yaitu pada tahun anggaran 2012 (Antara Sumbar, 1 Juni 2013), namun karena lemahnya sistem pengendalian intern, opini untuk laporan keuangan Kota Solok harus turun lagi menjadi WDP seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, hal ini juga dikarenakan kualitas manajemen

pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya lebih ditingkatkan lagi, sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan diperoleh output, outcome, dampak, dan manfaatnya yang jelas sebagaimana diharapkan masyarakat Kota Solok. Walaupun pemahaman staf di pemerintah kota Solok sudah dikatakan baik terhadap pemahaman atas teknologi informasi, namun kinerja pemerintah tersebut belum maksimal. Terbukti dengan penurunan opini laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari WTP menjadi WDP. Penurunan WTP ke WDP tersebut menjadi tolak ukur dan evaluasi atas kinerja pemerintah Kota Solok (Bakinnews.com 15 juli 2014).

Berdasarkan fenomena diatas, untuk mencapai kinerja pemerintahan yang baik maka dibutuhkan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta sistem pengendalian intern pemerintah yang baik. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah tersebut. Begitu juga dengan sistem pengendalian intern pemerintah, kembali melemahnya sistem pengendalian intern pemerintah kota Solok menyebabkan pemerintah kota Solok harus rela kembali menerima opini WDP yang diberikan oleh BPK RI. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja pemerintah Kota Solok kembali menurun.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al.* (1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan

teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Sistem informasi yang didukung Teknologi Informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif, karena untuk menciptakan informasi yang lebih akurat, relevan, dan reliable diperlukan sebuah teknologi yang mampu memberikan kejelasan sasaran informasi yang disampaikan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses-akses antar unit kerja.

Dengan aplikasi teknologi maka instansi pemerintahan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Pengaplikasian teknologi informasi tersebut sangat membantu dalam pengolahan data agar lebih cepat, efektif, dan efisien sehingga menghemat waktu dan biaya. Teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut

dikarenakan salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan (Parasuraman et al., 1988 dalam Mardjiono 2009), dimana dimensi tersebut dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan yang diberikan akan semakin cepat dan akurat.

Pemanfaatan teknologi yang efektif dapat meningkatkan kinerja. Hal ini sesuai dengan model penerimaan teknologi (*technology acceptance model/ TAM*). TAM (*Technology Acceptance Model*) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja. Kinerja berhubungan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas yang dilaksanakan oleh karyawan atau pegawai didalam organisasi pemerintahan tersebut (Thai FJ ; 2002 dalam Vina, 2008). Sehingga, semakin tinggi kinerja pegawai semakin meningkat pula efektifitas, produktivitas dan kualitas pelayanan instansi tersebut.

Berkaitan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi di lingkungan pemerintah daerah, mantan dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Asrul Syukur menjelaskan bahwa setiap pejabat harus bisa menggunakan teknologi, para pejabat dalam menjalankan tugasnya diharapkan menguasai teknologi informasi sehingga berbagai tugas dapat dijalankan dengan baik seperti komputer (Singgalang, 30 Januari 2009 dalam Dewi 2012).

Pemanfaatan atau implementasi teknologi informasi dalam kegiatan operasional instansi pemerintahan memberikan dampak yang cukup signifikan bukan hanya dari efisiensi kerja tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal, antar unit, maupun keseluruhan institusi.

Selain itu implementasi atau pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif yang secara umum adalah terjadi efisiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian secara optimal juga harus diperhatikan, agar semua perangkat teknologi informasi bersifat multi fungsi sehingga dalam pengembangan selanjutnya diupayakan terjadi integrasi perangkat. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Dari fenomena diatas, selain pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern juga dibutuhkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Tujuan dari SPIP adalah : 1) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, 2) Keandalan pelaporan keuangan, 3) pengamanan asset Negara, dan 4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan SPIP pada Pemerintah Daerah akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

Soeseno (2009 dalam Rosdiana 2010) menyatakan dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern pemerintah terkait dengan kinerja pemerintah merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas suatu kinerja. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen

kepastian yang layak bahwa pemerintah telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas (Arens, dkk 2008 dalam Rosdiana 2010).

Penerapan SPIP di pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan karena dapat dijadikan barometer dalam penilaian pemerintah daerah serta kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya penerapan SPIP, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah serta keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik. Serta diharapkan pemerintah dapat bertanggungjawab atas kinerjanya dalam mengelola program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat.

Sistem pengendalian intern yang baik dalam pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga nantinya akan memberikan suatu keyakinan bagi pemerintah bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif, dan efisien, dan hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintah daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Bandi, (2006) menunjukkan bahwa investasi teknologi informasi perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Begitu juga dengan Rahadi (2007) juga menyatakan bahwa informasi teknologi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Mardjiono (2009) juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan Teknologi

Informasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi yaitu RSUD di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kembali bagaimana pengaruh Pemanfaatan Informasi Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Solok. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris mengenai :

- a) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah.
- b) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah.

b. Bagi Akademis

Bagi akademis diharapkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Kinerja Instansi Pemerintah

a. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok dalam suatu perusahaan. Suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja optimal jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Mangkunegara (2002), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. As'ad (1991) dalam Rosdiana (2010) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu fungsi kerja atau aktivitas selama periode tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dalam konteks pemerintahan, kinerja akan dinilai sebagai suatu prestasi manakala dalam melaksanakan suatu kegiatan dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Mardiasmo (2002) dalam Legina (2008) mengemukakan kinerja program berhubungan dengan akuntabilitas publik, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggungjawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya.

b. Indikator Kinerja

Menurut Indra (2006) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah :

- 1) Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, peraturan, informasi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud maupun tidak berwujud. Penerapan indikator output merefleksikan bagaimana organisasi melihat kejelasan

dan ketelitian pegawai dalam melaksanakan program kerja, serta memaparkan seberapa besar rencana yang berhasil dilaksanakan.

- 3) Hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Hasil dari suatu perencanaan juga diharapkan dapat menilai kualitas hasil program kerja yang sesuai dengan sasaran, tujuan dan sasaran.
- 4) Manfaat (*benefit*) adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan proses yang berkelanjutan sampai pada menetapkan indikator yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan dan program kerja, serta adanya pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program.
- 5) Dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kegiatan baik yang positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Peningkatan pengendalian dalam pelaksanaan program akan menjamin pola pertanggungjawaban di organisasi. Penetapan indikator *impact* menentukan kinerja pelaksanaan program yang lebih baik dan lebih kompeten.

Levine dkk (1990) dalam Yulianda (2012) mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, yaitu :

a) Responsivitas

Mengacu pada keselarasan antara program kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogram dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja tersebut dinilai semakin baik.

b) Responsibilitas

Menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik itu dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta pelaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik.

c) Akuntabilitas

Mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi sektor publik apabila seluruhnya, atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan pada wakil rakyat.

Menurut Syahrudin (2005), pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam penerapannya, dibutuhkan suatu artikulasi yang jelas mengenai visi, misi,

tujuan dan sasaran yang dapat diukur dari satu dan keseluruhan program. Ukuran tersebut dapat dikaitkan dengan hasil atau *outcome* dari setiap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, pengukuran kinerja organisasi merupakan dasar yang *reasonable* untuk pengambilan keputusan.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan perwujudan dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

c. Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2004), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*)
- b) Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi
- c) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk pencapaian *goal congruence*
- d) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengertian Teknologi Informasi

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, teknologi yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yg diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut O'Brien (2006:28) dalam Wijana (2007) teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi.

Informasi, di dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; keseluruhan makna yg menunjang amanat yg terlihat di bagian-bagian amanat itu. Menurut Aji (2005:6) dalam Wijana (2007) informasi adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Teknologi Informasi (TI) meliputi segala alat maupun metode yang terintegrasi untuk digunakan dalam menjaring atau menangkap data (*capture*), menyimpan (*saving*), mengolah (*process*), mengirim (*distribute*), atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik ke dalam berbagai format, yang bermanfaat bagi *user* (pemakai informasi). Teknologi ini dapat berupa kombinasi perangkat keras dan lunak dari komputer, non komputer (*manual*) maupun prosedur, operator, dan para manajer dalam suatu sistem yang terpadu satu sama lain.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al.* (1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Hamzah, 2009 dalam Fadila 2013) :

- 1) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
- 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan.

Yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson et al., 2000 dalam Dewi, 2012) :

- 1) Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
- 2) Keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
- 3) Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
- 4) Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu,
- 5) Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
- 6) Pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak, dan

- 7) Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manajer yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggungjawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

b. Tingkat Integrasi Teknologi Informasi

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Dewi (2012) pemanfaatan teknologi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi terdiri dari :

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- 2) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
- 3) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- 4) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Laporan akuntansi dan manajemen dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
- 6) Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern : (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan aset, (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam PP No 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP wajib dilaksanakan

oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

b. Tujuan SPIP

Tujuan dari SPIP adalah :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah,
- 2) Keandalan pelaporan keuangan,
- 3) Pengamanan asset Negara, dan
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Alasan atau latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Paket Reformasi Keuangan Negara menuju *Good Governance* atau tata kelola yang baik dan *Good Geverment*.

c. Unsur-unsur SPIP

Penerapan SPIP bersifat menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Ia bukan bagian terpisah dari kegiatan, ataupun ditambahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang telah disusun. Sebaliknya, SPIP berjalan bersama-sama dengan kegiatan lain dalam satuan kerja instansi pemerintah. Ini tercermin dalam unsur-unsur yang ada dalam SPIP, yaitu:

1) Lingkungan pengendalian

PP Nomor 60/2008 mewajibkan Pimpinan Instansi Pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Hal ini merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi unsur dasar di dalam SPIP. Kemampuan pimpinan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif akan menjadi motivasi kuat bagi para pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sebaliknya, pimpinan yang tidak/kurang kompeten dalam menciptakan lingkungan yang positif akan berpotensi mempengaruhi pegawai untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan instansinya.

Untuk menciptakan lingkungan pengendalian seperti dimaksud PP tersebut, pimpinan instansi dapat menerapkannya melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan suatu proses pengidentifikasian dan penganalisaan risiko-risiko yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan entitas dan penentuan reaksi yang tepat terhadap risiko yang timbul akibat perubahan (Rosdiana:2010). Ini berarti bahwa penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan berakhir dengan penentuan reaksi terhadap risiko.

Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah melakukan penilaian resiko melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Menetapkan tujuan instansi dengan cara memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- b) Menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah.
- c) Melakukan identifikasi risiko untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

- d) Melakukan analisa risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, pimpinan instansi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Dalam mempertimbangkan risiko, pimpinan Instansi Pemerintah mengambil keputusan setelah dengan cermat menganalisis risiko terkait dan menentukan bagaimana risiko tersebut diminimalkan.

3) Kegiatan pengendalian;

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kegiatan pengendalian” adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b) Pembinaan sumber daya manusia; Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- c) Pengendalian fisik atas aset;
- d) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- e) Pemisahan fungsi;
- f) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- g) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

- h) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- i) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- j) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan komunikasi;

Informasi yang ada di dalam organisasi diidentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat dengan cara yang efektif. Ini dilaksanakan mulai dari pimpinan hingga ke seluruh pegawai yang ada di instansi pemerintah. Dengan mengkomunikasikan informasi secara efektif, maka akan tercipta pengertian yang sama di seluruh tingkat organisasi. Ini akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman (*misunderstanding*) maupun distorsi informasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan komunikasi efektif, maka pimpinan instansi:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan pengendalian intern.

Untuk memastikan apakah SPIP dijalankan dengan baik oleh suatu instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan akan menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan

review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a) Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas
- b) Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern
- c) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tuasikal (2007)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD	Pemahaman Sistem Akuntansi keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja SKPD	Secara simultan pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
2	Vina Novita (2008)	Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian	Pengetahuan Teknoplgi Informasi, Pemanfaatan TI, Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan	Pengetahuan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai

		Tugas-Teknologi dan Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai Teknologi Sistem Informasi yang baru Terhadap Kinerja Akuntan	Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai Teknologi Informasi yang Baru an Kinerja Akuntan	Teknologi Sistem Informasi yang baru mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Akuntan
3	Rosdiana (2010)	Pengaruh SPIP dan Penerapan terhadap good governance terhadap Kinerja Pemerintah Kota Padang	SPIP dan penerapan terhadap good governance	SPIP dan Penerapan terhadap good governance berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kota Padang
4	Delvia Fitri (2011)	Pengaruh Menentukan Kesulitan Menentukan Ukuran Kinerja, Pelatihan dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menentukan Kesulitan Menentukan Ukuran Kinerja, Pelatihan dan Budaya Organisasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menentukan Kesulitan Menentukan Ukuran Kinerja, Pelatihan dan Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5	Azwir Nasir (2011)	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.	pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan kinerja instansi pemerintah.	pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
6	Galuh Fajar Dellano (2012)	Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Daerah	Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Daerah, dan	Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif

		terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SPI sebagai Variabel Intervening	Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SPI	signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SPI sebagai Variabel Intervening
7	Andry Trisaputra (2013)	Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan Daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

1. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemanfaatan atau implementasi teknologi informasi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan bukan hanya dari efisiensi kerja tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal, antar unit, maupun keseluruhan institusi. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif yang secara umum adalah terjadi efisiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Jika teknologi informasi yang ada mampu dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk

mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al.*(1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Salah satu manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Goodhue dan Thompson (1995) dalam Setiawan (2005) menyarankan agar konsep pemanfaatan teknologi berkaitan dengan dua hal : menggunakan atau tidak menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi diukur berdasarkan ketergantungan pemakai terhadap sistem informasi yang ada untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2007) menyatakan bahwa informasi teknologi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Mardjiono (2009) juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian serupa dilakukan oleh Wijana (2007) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja individual pada bank perkreditan rakyat di kabupaten Tebanan. Sedangkan menurut Azwir (2011) tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kampar Riau.

2. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu pemerintah akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberi keyakinan bagi pemerintah bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, pelaksanaan pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Dalam PP No 60 tahun 2008 tersebut kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian intern terdiri atas review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil penelitian Prasetyono dan Kompyurini (2007) tentang analisis kinerja rumah sakit daerah dengan pendekatan *balanced scorecard* berdasarkan komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) survei pada rumah sakit daerah di Jawa Timur menyimpulkan bahwa komitmen organisasi, pengendalian intern dan *good corporate governance* secara simultan variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja RSD.

Penelitian yang dilakukan Ramandei (2009) menyatakan bahwa dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Demikian juga dengan hasil penelitian Rosdiana (2010), mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah yang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah Kota Padang.

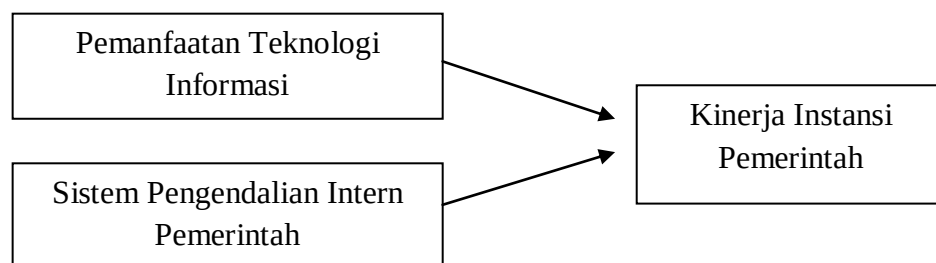
D. KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut Hamid (2007) dalam Dewi (2012), kerangka konseptual merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern. Faktor-faktor ini dinilai cenderung dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya SPIP

agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitu juga dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintah dapat bertanggungjawab atas kinerjanya dalam mengelola dana publik dengan adanya beberapa elemen dari SPIP tersebut kinerja pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Gambar 1: Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.



E. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H_1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

H_2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah” adalah sebagai berikut:

1. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal didasarkan dengan uji statistik regresi berganda dimana diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,001. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima. Apabila terjadi peningkatan pada pemanfaatan teknologi informasi maka kinerja instansi pemerintah juga akan mengalami peningkatan.
2. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini didasarkan dengan uji statistik regresi dimana diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,049. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima. Apabila terjadi peningkatan pada sistem pengendalian intern pemerintah maka kinerja instansi pemerintah juga akan mengalami peningkatan.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian sehingga mengakibatkan peneliti tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Pada penelitian ini hanya melihat variabel pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah.
3. Metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.
4. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa item pernyataan ke 6 pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_2) pada tabel distribusi frekuensi memperoleh nilai TCR terendah setelah yaitu 77,78%. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan batas dan penetapan toleransi resiko pada SKPD Kota Solok belum begitu baik.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dalam hal waktu, hendaklah peneliti selanjutnya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen yang memungkinkan dalam mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Misalnya variabel kompetensi SDM yang ada, budaya organisasi, komitmen pegawai, ketaatan terhadap peraturan perundangan, penerapan akuntabilitas keuangan dan lain sebagainya.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode lapangan dan wawancara.
4. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa item pernyataan ke 6 pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_2) pada tabel distribusi frekuensi memperoleh nilai TCR terendah setelah yaitu 77,78%. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan batas dan penetapan toleransi resiko pada SKPD Kota Solok belum begitu baik. Penulis menyarankan agar penentuan batas dan penetapan toleransi resiko pada SKPD bisa lebih dijalankan sesuai dengan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Trisaputra. 2013. *Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan Daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang
- Astuti Handaiyani, dan I Ketut Suryanawa. 2012. *Pemanfaatan teknologi informasi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Individual pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar
- Azwir Nasir. 2011. *Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Riau
- Bandi. 2006. *Pengaruh respon perusahaan dalam investasi teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan: strategi bisnis, kematanganteknologi informasi, dan ukuran perusahaan sebagai variable lanteseden*. Jurnal. Fakultas ekonomi universitas sebelas maret, Surakarta
- Delvia Fitri. 2011. *Pengaruh Menentukan Kesulitan Menentukan Ukuran Kinerja, Pelatihan dan Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi, Universitas Negeri Padang: Padang.
- Dewi Pebriyani. 2012. *Pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang
- Direktorat Aparatur Negara. 2006. *Manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi pemerintah (suatuprofil)*.
- Fadila Ariesta. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang
- Gaspersz, Vincent. 2004. *Perencanaan strategic untuk peningkatan kinerja sektor publik, suatu petunjuk praktek*. Gramedia, Jakarta.
- Hasibuan Hara. 2010. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknolog iInformasi dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, studi pada SKPD Kota Pekanbaru*, Jurnal S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau

- Iktria Susanti. 2013. *Pengaruh Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi*. Jurnal S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kajian Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam Pelayanan Publik. 2009. Direktorat Aparatur Negara-BPPN.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta : UPP STIM
- Mardiasmo.2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi II, penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo.2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Mardjiono, Didik Eko. 2009. *Analisis Pengaruh kepemimpinan, pemanfaatan TI dan implementasi struktur organisasi yang terdesentralisasi terhadap kinerja organisasi. studi pada RSUD Kab. Temanggung*, Jurnal Universitas Padjajaran.
- Miftahul Jannah. 2010. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, studi pada SKPD Kab.Kampar*, Jurnal S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Muhammad Kurniawan. 2013. *Pengaruh Komitmen, Budaya Koordinasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik*. Sripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang
- Muslimin. *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Pengendalian Perilaku dan Pengendalian Personalia terhadap Kinerja Manajerial pada PT Berkat Agung Jaya Abadi (Gresik)*. Jurnal Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur Surabaya.
- Mutia Legina. 2008. *Pengaruh prinsip Good Governance dan komitmen organisasi dan dimediasi oleh gaya kepemimpinan terhadap kinerja sektor publik*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Parno. 2005. *Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Di Kota Semarang*. Jurnal Universitas Negeri Semarang: Semarang.

Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah. BPKP 2000

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI 2006.

Prasetyono dan Kompyurini. 2007. *Analisis Kinerja Rumah Sakit dengan pendekatan Balanced Scorecard berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern and Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)*. Makasar : Simposium Nasional Akuntansi.

Rahadi Dedi Rianto. 2007. *Peranan Teknologi Informasi dalam peningkatan pelayanan di sector publik*. Seminar Nasional Teknologi. Yogyakarta.

Revano Ramadani. 2013. *Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi kerja terhadap kinerja SKPD*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang

Rinda Emillyza. 2012. *Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan SPIP terhadap Nilai informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang

Rosdiana. 2010. *Pengaruh SPIP dan penerapan terhadap good governance terhadap kinerja pemerintah kota padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang

Salvia Vera. 2011. *Pengaruh Pengawasan Inspektorat dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD*. Skripsi, Universitas Negeri Padang: Padang.

Seprima Ade. 2012. *Pengaruh Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap manfaat penerapan SAP*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang

Setiawan Imran. 2005. *Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Terhadap Kinerja Akuntan*. Jurnal, Universitas Riau: Pekanbaru.

Sihaloho dan Halim. 2005. *Pengaruh faktor-faktor rasional, politik dan kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi pemerintah daerah*. Solo: SNA 8.

Solikhin Akhmad. 2006. *Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah : Perkembangan dan Permasalahan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 2, November

Sudarwan Danim. 2004. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*. Bumi Aksara: Jakarta

Tuasikal. 2007. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD*. Jurnal.

UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara

UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Vina Novita. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas- Teknologi dan Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai Teknologi Sistem Informasi yang baru Terhadap Kinerja Akuntan*. Jurnal, Universitas Riau: Pekanbaru.

Wijana, Nyoman. 2007. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan pengaruhnya pada kinerja individual pada bank perkreditan rakyat di kabupaten tabanan*. Jurnal. Universitas Udayana ; Bali.

www.Bakinnews.com

www.Google.com

Yulianda Betri. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Aparat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang